

**Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan  
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Sulawesi Utara**

**Anggi Kartika Kumaat<sup>1</sup>  
Jenny Morasa<sup>2</sup>  
Meily Y. B. Kalalo<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
Email : anggikumaat@gmail.com

**ABSTRACT**

*Financial recording and reporting are very important in a company. SKPD is works unit of the region government in the capacity of budgeted user/commodity user. Each and every region work unit provide information about financial recording and reporting. In this study the object taken at Department of Marine and Fishery of North Sulawesi Province. This study aims to show how financial recording and reporting appropriate with government regulation number 71 year 2010 concerning governmental accounting standard and internal affairs minister regulation number 57 year 2007 concerning regional financial management and to identify constraint which is faced by department of marine and fishery of north Sulawesi province. The research method used is qualitative method by collecting financial report, general overview of the company, and analyze financial recording and reporting. The results showed that the financial recording and reporting the Department of Marine and Fishery of North Sulawesi Province is not in accordance with the regulation No. 71 year 2010 concerning Governmental Accounting Standards for the presentation are not included Cash Flow Statement, Statement of Changes Equity, Statement of Changes in Balance Budget Surplus, and operational reports.*

**Keywords:** *analysis, recording, reporting*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Era transparansi dan globalisasi merupakan suatu fenomena bagi setiap entitas organisasi dalam mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang dilakukan, baik pada lingkup organisasi privat maupun organisasi publik. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Paradigma baru dalam “Reformasi Manajemen Sektor Publik” adalah penerapan akuntansi dalam praktik pemerintah guna mewujudkan *good governance*. Dalam rangka mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintah yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma yang baru menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat serta mampu memperdaya daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional bahkan internasional. Dengan menanggapi paradigma baru maka pemerintah memberikan otonomi daerah yang bertujuan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar mampu berdaya guna dan berhasil guna untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. (Nordriawan & Hertianti, 2010: 193). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (Nordriawan & Hertianti, 2010: 201).

Dalam sistem Pemerintah Daerah terdapat dua subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan sebaik mungkin. Dalam penyusunan laporan keuangan SKPD, secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kertas kerja/laporan keuangan oleh SKPD dilatar belakangi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah sekaligus sebagai pengguna anggaran harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Dalam kemajuan yang ada sekarang ini, maka sebagai pengguna anggaran harus melakukan pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pencatatan dan pelaporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pencatatan dan pelaporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat mengembangkan pengetahuan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi khususnya jurusan akuntansi dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan

#### **2. Manfaat Praktis**

Dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara

- (a) Bagi penulis: untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan khusus dalam pencatatan dan pelaporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Pengertian Akuntansi**

Definisi akuntansi seperti yang diberikan oleh Komite Terminologi dari *American Institute of Certified Public Accountants* adalah sebagai berikut: akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya. (Riahi-Belkaoui, 2011:50).

#### **2.1.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang di maksud pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam peraturan ini juga pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

#### **2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

#### **2.1.4 Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah**

##### **1. Pengertian Anggaran**

Anggaran adalah pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. (Hariadi, Restianto, & Bawono 2010:7).

##### **2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

##### **3. Akuntansi Anggaran**

Akuntansi anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktek ini adalah melihat cara pelaksanaan anggaran yang sudah di buat dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan kebutuhannya. (Nordawan & Hertianti, 2010: 100).

#### **2.1.5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja. Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja, (Hariadi, dkk. 2010:133) yaitu:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- b. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah tentang akuntansi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Siklus Akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis transaksi
2. Jurnal
3. Posting ke buku besar
4. Neraca saldo
5. Jurnal penyesuaian
6. Neraca saldo setelah penyesuaian
7. Laporan keuangan terdiri dari :
  - a. laporan realisasi anggaran
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih
  - c. neraca
  - d. laporan operasional
  - e. laporan arus kas
  - f. laporan perubahan ekuitas
  - g. catatan atas laporan keuangan
8. Jurnal penutup

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan pengambilan data pada dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Alamat penelitian kompleks perkantoran pertanian Kalasey. Dan waktu penelitian dimulai bulan Juni 2015.

#### **3.3 Prosedur Penelitian**

Penulisan ini menggunakan tahap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, tahap-tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Merumuskan permasalahan yang jelas dan menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum perusahaan dan data mengenai analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.
4. Menganalisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.

#### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung, yaitu dengan percakapan langsung serta tanya jawab dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan. Studi dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Pengamatan/observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan kunjungan secara langsung pada objek untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **3.5 Metode Analisis**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas

### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Analisis Transaksi**

##### **4.1.1 Pendapatan**

Dalam hasil penelitian ini, yang dimaksudkan pendapatan adalah pendapatan yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran bersangkutan. Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara berasal dari retribusi. Dan pada tahun 2010 sampai dengan 2014 terdiri dari:

- a) Pendapatan retribusi jasa usaha
- b) Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah
- c) Pendapatan retribusi perizinan tertentu
- d) Pendapatan retribusi jasa umum
- e) Pendapatan lainnya
- f) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.

#### **4.1.2 Belanja**

1. Belanja Operasi
  - a) Belanja Pegawai adalah dalam hal ini dalam bentuk uang untuk seluruh pegawai yang ada dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara yang telah melaksanakan tugas kemudian diberikan imbalan berupa uang.
  - b) Belanja Barang adalah pengeluaran untuk penyediaan barang dan jasa berupa biaya alat tulis kantor, biaya cetak dan penggandaan, biaya pemeliharaan peralatan kantor, biaya telepon, biaya perjalanan dinas, biaya BBM, biaya makanan dan minuman, dan lain sebagainya.
2. Belanja Modal
  - a. Belanja Tanah
  - b. Belanja Peralatan dan Mesin
  - c. Belanja Gedung dan Bangunan
  - d. Belanj Irigasi dan Jaringan
  - e. Belanja Aset Tetap Lainnya

#### **4.1.3 Aset**

Aset adalah aset tetap yang dikuasai atau digunakan oleh Badan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, yaitu berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instansi, aset tetap lainnya.

#### **4.2Jurnal**

1. Akuntansi Belanja (Pengeluaran Kas)

**Table Jurnal Akuntansi Belanja**

<b>Tgl</b>	<b>Kode Rek.</b>	<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Ref.</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
2010		Belanja Pegawai Kas di Bendahara Pengeluaran		7.653.337.523	7.653.337.523
		Belanja Barang Kas di Bendahara Pengeluaran		4.785.557.700	4.785.557.700
		Belanja Peralatan dan Mesin Kas di Bendahara Pengeluaran		190.200.000	190.200.000
2011		Belanja Pegawai Kas di Bendahara Pengeluaran		8.838.155.812	8.838.155.812
		Belanja Barang Kas di Bendahara Pengeluaran		12.045.777.162	12.045.777.162
		Belanja Peralatan dan Mesin Kas di Bendahara Pengeluaran		564.452.000	564.452.000
2012		Belanja Pegawai Kas di Bendahara Pengeluaran		9.128.874.383	9.128.874.383
		Belanja Barang Kas di Bendahara Pengeluaran		7.066.688.260	7.066.688.260
		Belanja Peralatan dan Mesin Kas di Bendahara Pengeluaran		8.360.651.000	8.360.651.000
2013		Belanja Pegawai Kas di Bendahara Pengeluaran		9.172.100.209	9.172.100.209
		Belanja Barang Kas di Bendahara Pengeluaran		16.099.561.796	16.099.561.796
		Belanja Peralatan dan Mesin Kas di Bendahara Pengeluaran		611.151.000	611.151.000
2014		Belanja Pegawai Kas di Bendahara Pengeluaran		10.090.237.351	10.090.237.351
		Belanja Barang Kas di Bendahara Pengeluaran		31.167.396.200	31.167.396.200
		Belanja Peralatan dan Mesin Kas di Bendahara Pengeluaran		1.245.720.000	1.245.720.000

Sumber: Data Hasil Olahan

a). Akuntansi Belanja Langsung (LS)

**Tabel Jurnal Umum Pencatatan Berdasarkan SP2D-LS**

<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Ref.</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
2010	BELANJA Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga R/K PPKD		12.438.895.223 240.150.000 0	12.679.045.223
2011	BELANJA Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga R/K PPKD		21.620.108.974 736.176.000 0	21.693.726.574
2012	BELANJA Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga R/K PPKD		16.195562.643 9.329.638.000 0	25.525.200.649
2013	BELANJA Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga R/K PPKD		25.271.662.005 1.281.343.000 0	26.553.005.005
2014	BELANJA Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga R/K PPKD		36.558.623.470 2.699.223.500 0	39.257.846.970

Sumber: Data Hasil Olahan

## 2. Akuntansi aset

**Tabel Aset Tetap**

<b>Keterangan</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>ASET TETAP</b>					
Tanah	16.025.900.000	16.025.900.000	16.025.900.000	16.025.900.000	16.025.900.000
Peralatan dan Mesin	2.249.618.800	3.062.825.800	10.424.242.290	3.404.906.850	4.032.473.000
Gedung dan Bangunan	12.529.702.500	12.681.476.500	13.414.788.500	14.084.980.500	15.398.651.313
Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.024.980.000	1.044.930.000	1.024.980.000	1.024.980.000	1.404.125.000
Aset Tetap Lainnya	2.000.000	2.000.000	179.750.000	179.750.000	384.568.000
<b>JUMLAH</b>	<b>31.832.201.300</b>	<b>32.817.132.300</b>	<b>41.069.660.790</b>	<b>34.720.517.350</b>	<b>37.245.717.313</b>

Sumber: Data Hasil Olahan

Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara dalam hal ini tidak membuat jurnal akuntansi aset, sehingga penulis membuat Jurnal tersebut dalam penelitian ini dan juga untuk menjadi bahan masukkan pada Dinas Kelautan dan Peikanan Sulawesi Utara, sebagai berikut:

**Table Jurnal Akuntansi Aset**

<b>Tahun</b>	<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
2010	Aset tetap peralatan dan mesin Diinvestasikan dalam aset tetap	2.249.618.800	2.249.618.800
2011	Aset tetap peralatan dan mesin Diinvestasikan dalam aset tetap	3.062.825.800	3.062.825.800
2012	Aset tetap peralatan dan mesin Diinvestasikan dalam aset tetap	10.424.242.290	10.424.242.290
2013	Aset tetap peralatan dan mesin Diinvestasikan dalam aset tetap	3.404.906.850	3.404.906.850
2014	Aset tetap peralatan dan mesin Diinvestasikan dalam aset tetap	4.032.473.000	4.032.473.000

Sumber: Data Hasil Olahan

### **4.3 Posting ke Buku Besar**

Setelah melakukan pencatatan pada buku jurnal, langkah selanjutnya PPK-BKD akan melakukan posting ke buku besar rekening masing-masing. Posting dilakukan secara periodik. Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara tidak membuat buku besar sesuai rekening masing-masing, hanya membuat buku kas umum untuk semua transaksi.

### **4.4 Jurnal Penyesuaian**

Jurnal penyesuaian yang dibuat oleh PPK-BKD adalah untuk koreksi kesalahan atas pencatatan yang terjadi dan tidak ada penyesuaian untuk penyusutan aset tetap baik penyusutan untuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, maupun untuk aset tetap tersebut, dan ini sudah jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

### **4.5 Neraca Saldo Setelah Penyesuaian**

Setelah melakukan posting ke buku besar terhadap jurnal penyesuaian, maka akan ada beberapa perkiraan yang akan mengalami perubahan dan juga akan ada rekening baru yang muncul. Saldo-saldo perkiraan yang masuk dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo rekening yang sudah disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka perkiraan tersebut dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian.

Neraca saldo dan neraca saldo setelah penyesuaian tidak dibuat secara terpisah oleh PPK-BKD tetapi hanya dalam kertas kerja (*worksheet*), dan dari kertas kerja tersebut PPK-BKD menyusun laporan keuangan.

### **4.6 Laporan Keuangan**

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Berdasarkan data penelitian, Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014 berupa pendapatan dan belanja. Sehingga penulis dapat membuat laporan realisasi anggaran berupa:

Total realisasi pendapatan untuk tahun 2010 adalah RP.450.116.466 yang telah dianggarkan sebesar RP.208.860.712.

Total realisasi belanja untuk tahun anggaran 2010 sebesar RP.12.679.045.223 ini telah terjadi realisasi anggaran sebesar 97,17% dari yang telah dianggarkan sebesar RP.13.048.887.270.

Realisasi belanja tersebut terdiri dari:

1. Belanja operasional RP.12.438.895.223 (97,12%)
2. Belanja modal RP.240.150.000 (99,85%)

Total realisasi pendapatan untuk tahun 2011 adalah RP.819.505.155 yang telah dianggarkan sebesar RP.685.700.000.

Total realisasi belanja untuk tahun anggaran 2011 sebesar RP.21.620.108.974 ini menunjukkan telah terjadi realisasi anggaran sebesar 93,46% dari yang telah dianggarkan sebesar RP 23.132.802.000.

Realisasi belanja tersebut terdiri dari:

1. Belanja operasional RP.21.620.108.974 (93,46%)
2. Belanja modal RP.763.176.000 (98,58%)

Total realisasi pendapatan untuk tahun 2012 adalah RP.361.918.000 yang telah dianggarkan sebesar RP.220.000.000.

Total realisasi belanja untuk tahun anggaran 2012 sebesar RP.25.525.200.643 ini menunjukkan telah terjadi realisasi anggaran sebesar 94,54% dari yang telah dianggarkan sebesar RP.27.000.428.000.

Realisasi belanja tersebut, terdiri dari:

1. Belanja operasional RP.16.195.562,643 (94,29%)
2. Belanja modal RP.9.329.638.000 (94,97%)

Total realisasi pendapatan untuk tahun 2013 adalah RP.841.154.525 yang telah dianggarkan sebesar RP.700.485.500.

Total realisasi belanja untuk tahun 2013 sebesar RP.26.553.005.005 ini menunjukkan telah terjadi realisasi anggaran sebesar 84,42% dari yang telah dianggarkan sebesar RP.31.453.879.933.

Realisasi belanja tersebut, terdiri dari:

1. Belanja operasional RP.25.271.662.005 (83,81%)
2. Belanja modal RP.1.281.343.000 (94,97%)

Total realisasi pendapatan untuk tahun 2014 adalah RP.889.044.399 yang telah dianggarkan sebesar RP.753.387.022.

Total realisasi belanja untuk tahun anggaran 2014 sebesar RP.39.257.846.970 ini menunjukkan telah terjadi realisasi anggaran sebesar 88,96% dari yang telah dianggarkan sebesar RP.44.127.810.200.

Realisasi belanja tersebut, terdiri dari:

1. Belanja operasional RP.36.558.623.470 (88,37%)
2. Belanja modal RP.2.966.223.500 (97,96%)

## **2. Neraca**

Berdasarkan data penelitian, neraca Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2010 menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara sebesar RP.31.832.201.300 yang terdiri dari aset lancar, aset tetap RP.31.832.201.300 dan aset lainnya. Kewajiban yang dimiliki adalah berupa kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sedangkan ekuitas dana yang dimiliki adalah RP.31.832.201.300.

Pada tahun 2011 aset yang dimiliki sebesar RP.32.817.132.300 yang terdiri aset lancar, aset tetap RP.32.817.132.300 dan aset lainnya. Kewajiban yang dimiliki terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sedangkan ekuitas dana yang dimiliki RP.32.817.132.300.

Pada tahun 2012 aset yang dimiliki sebesar RP.45.915.899.290 yang terdiri dari aset lancar RP.4.846.238.500, aset tetap RP.41.069.660.790 dan aset lainnya. Kewajiban yang dimiliki RP.2.705.235.200. Sedangkan ekuitas dana yang dimiliki sebesar RP.37.537.490.450.

Pada tahun 2013 aset yang dimiliki sebesar RP.38.729.543.650 yang terdiri dari aset lancar RP.4.008.952.800, aset tetap RP.34.720.517.350 dan aset lainnya. Kewajiban yang dimiliki sebesar RP.2.705.235.200. Sedangkan ekuitas dana yang dimiliki sebesar RP.36.024.308.450.

Pada tahun 2014 menunjukkan bahwa aset yang dimiliki RP.42.377.470.663 yang terdiri dari aset lancar RP.4.673.600.000, aset tetap RP.37.245.717.313 dan aset lainnya RP.458.153.350. Kewajiban yang dimiliki adalah berupa kewajiban jangka pendek RP.3.608.262.204. Sedangkan ekuitas dana yang dimiliki adalah RP.38.769.208.458,60

## **3. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan data penelitian, catatan atas laporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Data umum SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara
2. Ikhtisar pencapaian kinerja organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara
3. Kebijakan akuntansi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara
4. Penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.

#### **4.7 Jurnal Penutup**

Setelah menyusun laporan keuangan tahunan, maka PPK-BKD membuat jurnal penutup yang bertujuan untuk menutup saldo perkiraan nominal agar supaya tidak terbawa ke periode anggaran berikutnya. Pada dasarnya, jurnal penutup adalah mendebet perkiraan yang bersaldo kredit dan mengkreditkan perkiraan yang bersaldo debet dan selisihnya merupakan surplus atau defisit. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) di neraca menjadi jumlah benar.

#### **Pembahasan**

Penerapan Akuntansi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, namun dalam penyajiannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencatatan laporan keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara belum lengkap karena tidak ada Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pelaporan keuangan disusun secara *double entries* atas seluruh pendapatan/penerimaan dan belanja/pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Informasi yang disajikan tepat waktu, dan proses pencatatan laporan keuangan sudah baik.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara memiliki kendala yang dihadapi, penyajian laporan keuangan juga belum sesuai dengan peraturan yang ada khususnya peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan dan peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan keuangan daerah.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Melihat data laporan keuangan juga keterangan yang diperoleh pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maka dapat diambil kesimpulan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara yang dalam pencatatan dan pelaporan keuangan belum sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah NO. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karena tidak ada laporan arus kas, laporan

operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Namun dalam penyajian laporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara sudah baik, dan tepat waktu.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dalam hal akuntansi pendapatan, belanja dan aset telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan pada tahun 2010 sampai dengan 2014 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan.

## **5.2 Saran**

Ada berapa hal yang diusulkan penulis dalam penelitian ini:

1. Untuk tahun anggaran 2015 dan seterusnya hendaknya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dalam pengelolaan keuangan daerah telah berpedoman sepenuhnya pada peraturan-peraturan yang ada, agar pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar efektif dan dapat terwujud dan laporan keuangan yang disajikan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut.
2. Perlu adanya sumber daya manusia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki spesialisasi dalam rangka pencatatan dan pelaporan keuangan SKPD.
3. Dalam pencatatan dan pelaporan keuangan hendaknya Dinas Kelautan dan Perikanan menggunakan sistem komputer agar bisa mempermudah dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmed Riahi-Belkaoui, 2011. Teori Akuntansi Buku 1. Edisi Kelima. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Deddi Nordiawan & Ayuningtyas Hertianti, 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Halen Ryanlie Ole, 2014. Analisis Implementasi Sistem Informasi manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Indra Bastian, 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Paramono Hariadi, Yanuar E. Restianto, & Icut Ranga Bawono, 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.

- Muqodim, 2005. Teori Akuntansi. Cetakan Pertama. Ekonisia. Yogyakarta.
- Noviana Endah, 2009. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus Pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 tentang, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang, Standar Akuntansi Pemerintahan.
- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang, Standar Akuntansi Pemerintahan.
- PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang, Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pricillia Sumendap, 2015. Evaluasi Penerapan 'SAK ETAP' pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung.
- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang, Perbendaharaan Negara.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintah Daerah.
- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Veronica Rantung, 2013. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Perhubungan Kota Manado. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Wasik N. Rintiani, 2014. Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado.